



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU**



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324)

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 18);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2021);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 26);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 110 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Nomor 111 Tahun 2022).
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah dan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode selama 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 merupakan dokumen yang disusun dengan mempedomani Renstra PD, hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA 2020 S/D TRIWULAN II TAHUN 2022
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Uraian secara rinci Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 12 Agustus 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 12 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022
NOMOR 65

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengamati pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan Pada tahun 2023, disamping mengoptimalkan program, kegiatan, sub kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan SKPD yang memuat kebijakan dan program, kegiatan dan subkegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selatpanjang, Juli 2022

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Meranti



M. KHAI DAFI, SE, M.IP

Penata Tk. I / (III.d)

NIP. 19701118 200901 1 005

DAFTAR ISI

Cover	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3 Isu-isu Penting Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINSOSP3AP2KB	23
3.1 Tujuan dan Sasaran	23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD	25
4.1 Matrik Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023.....	25
4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan	35
BAB V PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Capaian Program Kegiatan Sub Kegiatan Dinas SOSIALP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021	7
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial PPPA PPKB.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memuat ; program, kegiatan, dan subkegiatan ; lokasi kegiatan; indikator kinerja; kelompok sasaran; pagu indikatif dan prakiraan maju.

Kedudukan Renja OPD adalah merupakan rincian mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada OPD yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 (lima) tahun. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Meranti dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti.

Renja OPD diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. dan merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak berkepentingan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renja memerlukan keterlibatan dari para pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan misi organisasi.

Dalam upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti, diperlukan perencanaan yang komprehensif terarah dan terpadu, dengan bertumpu pada pola perencanaan berbasis perencanaan masyarakat, dengan melibatkan lebih banyak peran dari para stakeholders yang pada gilirannya diharapkan mampu menjembatani dan mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara transparan, demokratis dan akuntabilitas.

Berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, telah merubah pola perencanaan yang ada, dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down.

Selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran (RKA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2023.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5); dan
13. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 23).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) di masing-masing Dinas dimaksudkan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Program Pembangunan Daerah. Renja ini akan menjadi program, kegiatan, SubKegiatan strategis yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Kepulauan Meranti, APBD Provinsi maupun APBN.

Berkenaan dengan hal diatas, maka Penyusunan Renja Tahun 2023 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti bertujuan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama 1 tahun dan dijadikan acuan dalam merumuskan standar pengukuran kinerja Pelaksanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Meranti yang selanjutnya dijadikan landasan dalam Penyusunan APBD.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami Renja (RENJA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2021

Bab Ini berisikan tentang :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Bab ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Bab ini berisi tentang :

- 4.1. Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pagu Indikatif
- 4.2. Rencana Program, Kegiatan, dan SubKegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti.

Secara Rinci realisasi program / kegiatan yang memenuhi dan tidak memenuhi target, faktor-faktor penyebab terpenuhi / tidak terpenuhi target kinerja program / kegiatan, Implikasi yang timbul terhadap target capaian, kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor –faktor penyebab, terlampir dalam **tabel 1.1**

Tabel 1.1
Realisasi Capaian Program Kegiatan Sub Kegiatan Dinas SOSIALP3AP2KB
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	I		II		III		IV		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	
0.0.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Peralatan Pendukung Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	3.205	0 %	1.287	100 %	3.205	0	325	0	230	0	343	0	172	0 %	1.071	0 %	2.357	0.00 %	73.56 %	
0.0.01.01.58.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pegawai yang melakukan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	25 Orang	1.550	25 Orang	379	25 Orang	1.000	3	89	3	89	10	91	0	45	16 Orang	315	41 Orang	693	164.00 %	44.73 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
0.0.01.01.87.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah tenaga Pelayanan Perkantoran	19 Orang	847	35 Orang	528	35 Orang	595	3	144	4	142	4	86	3	83	14 Orang	454	49 Orang	982	257.89 %	115.94 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
0.0.01.01.88.	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Jumlah barang dan jasa Perkantoran	19 Unit	807	19 Unit	380	19 Unit	449	0	92	0	0	0	166	0	44	0 Unit	301	19 Unit	682	0.00 %	84.41 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
0.0.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan sarana Prasarana Aparatur	60 %	706	0 %	58	60 %	706	0	9	0	11	0	9	0	13	0 %	42	0 %	100	0.00 %	14.12 %	
0.0.01.02.276.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran	10 Unit	353	0 Unit	0	29 Unit	111	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Unit	0	0 Unit	0	0.00 %	0.00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	Verifikasi dan Analisis Data Terpadu (Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab)	jurnal	
			K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	I		II		III		IV		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)				
									K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)				K
0.0.01.02.277.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana yang di pelihara	19 Unit	353	17 Unit	58	18 Unit	190	2	9	5	11	6	9	3	13	16 Unit	42	33 Unit	100	173.68 %	28.24 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
0.0.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan kompetensi ASN	100 %	165	0 %	0	100 %	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %	0	0.00 %	0.00 %		
0.0.01.05.146.	Diklat, Bimtek dan Sosialisasi Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	165	0 Orang	0	7 Orang	45	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Orang	0	0 Orang	0	0.00 %	0.00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
0.0.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase laporan Kinerja dan Keuangan yang tersusun	100 %	105	0 %	9	100 %	105	0	2	0	13	0	0	0	0	0 %	15	0 %	24	0.00 %	23.14 %		
0.0.01.06.06.	Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD	Laporan Sakip OPD	15 Dokumen	75	4 Dokumen	9	15 Dokumen	50	2	2	9	13	0	0	0	0	11 Dokumen	15	15 Dokumen	24	100.00 %	32.40 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
0.0.01.06.13.	Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	Jumlah Dokumen SPIP OPD	25 Dokumen	30	0 Dokumen	0	25 Dokumen	25	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0.00 %	0.00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.01.06.15.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase fakir miskin dan KAT yang diberdayakan	90 %	3.823	0 %	123	90 %	2.811	0	1	0	0	0	0	0	0	0 %	1	0 %	124	0.00 %	3.24 %		
1.01.06.15.06.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemukiman bagi Kelompok Keluarga Fakir Miskin (FM)	Jumlah sarana prasarana masyarakat miskin yang direhab	90 Ruangan	900	0 Ruangan	0	37 Ruangan	3.540	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Ruangan	0	0 Ruangan	0	0.00 %	0.00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		1.01.06.16 Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Daerah		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Jumlah
			K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	I		II		III		IV		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.06.15.12.	Pemberdayaan KAT Kabupaten Kepulauan Meranti	Jumlah komunitas adat terpencil (KK) yang diberdayakan	200 Orang	150	0 Orang	0	150 Orang	811	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Orang	0	0 Orang	0	0,00 %	0,00 %			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1.01.06.15.13.	Rakor dan Sosialisasi Pendistribusian bantuan pangan non tunai (BPNT) / Bantuan Sosial Program sembako bagi keluarga penerima manfaat (KPM)	Jumlah Peserta	250 Orang	200	0 Orang	0	100 Orang	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Orang	0	0 Orang	0	0,00 %	0,00 %			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1.01.06.15.22.	Pembangunan balai Adat bagi Komunitas Adat Terpencil	Jumlah balai adat yang dibangun	1 Unit	462	0 Unit	0	2 Unit	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Unit	0	0 Unit	0	0,00 %	0,00 %			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1.01.06.15.24.	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Usaha Kelompok bagi Keluarga Miskin	Jumlah penanganan PMKS	1 Kelompok	39	0 Kelompok	0	41 Kelompok	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Kelompok	0	0 Kelompok	0	0,00 %	0,00 %			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1.01.06.15.26.	Pelatihan Petugas Pendataan Validasi Data Kemiskinan Kabupaten kepulauan Meranti	Jumlah peserta Pelatihan	100 Orang	172	0 Orang	0	100 Orang	89	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Orang	0	0 Orang	0	0,00 %	0,00 %			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1.01.06.15.27.	Pendataan dan Inventarisasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Kepulauan Meranti	Jumlah Peserta Pendataan dan Inventarisasi Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS)	112 Orang	750	0 Orang	0	112 Orang	234	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Orang	0	0 Orang	0	0,00 %	0,00 %			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1.01.06.15.28.	Sistem layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Kepulauan Meranti	Jumlah Peserta Petugas Pendampingan SLRT	109 Orang	650	0 Orang	0	109 Orang	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Orang	0	0 Orang	0	0,00 %	0,00 %			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		1.01.06.21 Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		Tingkat Pencapaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah (Ulu)	Sarana Prasarana dan Fasilitas	Unit Paten Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Jumlah Penerimaan
			K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	I		II		III		IV		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp				
1.01.06.16.07.	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah PMKS yang menerima layanan rehabilitasi	8 Orang	192	31 Orang	67	48 Orang	125	8	16	0	0	6	7	0	0	14 Orang	23	45 Orang	90	562.50 %	46.85 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1.01.06.16.17.	Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK)	Jumlah ktk yang menerima pelayanan	30 Orang	50	0 Orang	0	10 Orang	140	4	9	0	0	0	0	0	0	4 Orang	9	4 Orang	9	13.33 %	18.14 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1.01.06.16.20.	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)	Jumlah anak bermasalah yang diberikan layanan	80 Orang	485	35 Orang	27	20 Orang	74	0	15	0	12	0	20	0	0	0 Orang	47	35 Orang	75	0.00 %	15.41 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1.01.06.20.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah penyandang penyakit sosial yang menerima layanan rehabilitasi	25 Orang	360	0 Orang	0	25 Orang	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0.00 %	0.00 %				
1.01.06.20.04.	Pembinaan eks penyandang penyakit sosial	jumlah eks penyandang penyakit sosial yang menerima layanan rehabilitasi	25 Orang	360	0 Orang	0	25 Orang	144	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Orang	0	0 Orang	0	0.00 %	0.00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1.01.06.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan	75 %	2.145	0 %	102	75 %	2.423	0	13	0	2	0	1.233	0	366	0 %	1.614	0 %	1.716	0.00 %	80.02 %				
1.01.06.21.06.	Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Kepulauan Meranti	Jumlah Anggota Lembaga yang dibina	20 Orang	100	0 Orang	0	20 Orang	120	11	3	0	0	6	4	0	0	17 Orang	7	17 Orang	7	85.00 %	6.84 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1.01.06.21.08.	Pembinaan Karang Taruna Kabupaten Kepulauan Meranti	Jumlah Pengurus Karang Taruna yang dibina (Orang)	40 Orang	250	0 Orang	0	40 Orang	41	0	0	0	0	0	0	0	2	0 Orang	2	0 Orang	2	0.00 %	0.92 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Tingkat Pencapaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah Penanggung Jawab	jumlah
			K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	I		II		III		IV		K	Rp (Juta)	K	Rp				
									K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp				
1.01.06.21.17.	Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah PSKS yang aktif	35 Orang	495	34 Orang	102	9 Orang	143	0	0	4	2	0	0	0	0	4 Orang	2	38 Orang	105	0.00 %	21.16 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.01.06.22.	Program Rehabilitasi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan	90 %	210	0 %	6	90 %	210	0	25	0	0	0	31	0	9	0 %	66	0 %	72	0.00 %	34.19 %		
1.01.06.22.01.	Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	jumlah korban bencana yang menerima pelayanan	30 Kelompok	210	8 Kelompok	6	30 Kelompok	154	8	25	0	0	9	31	6	9	23 Kelompok	66	31 Kelompok	72	103.33 %	34.19 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.01.06.23.	Program Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan	40 %	1.664	0 %	427	40 %	1.664	0	15	0	47	0	108	0	0	0 %	170	0 %	597	0.00 %	35.85 %		
1.01.06.23.01.	Pendampingan Program Keluarga Harapan	Fasilitasi PKH	98 Orang	1.565	89 Orang	427	98 Orang	536	4	15	12	47	24	108	0	0	40 Orang	170	129 Orang	597	131.63 %	38.12 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.01.06.23.05.	Pengelolaan Data Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)	Jumlah data kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan	45000 Orang	99	0 Orang	0	45.000 Orang	99	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Orang	0	0 Orang	0	0.00 %	0.00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.02.02.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Kelembagaan dan anak yang aktif	50 %	1.288	0 %	136	50 %	1.305	0	47	0	0	0	106	0	132	0 %	284	0 %	420	0.00 %	32.62 %		
1.02.02.16.05.	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	jumlah lembaga PUG	9 OPD	370	0 OPD	0	9 OPD	500	0	0	0	0	0	0	9	132	9 OPD	132	9 OPD	132	0.00 %	0.00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Penguatan Kelembagaan		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	jumlah	
			K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	I		II		III		IV		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp			
									K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)									K
1.02.02.16.13.	Pengembangan kapasitas SDM Konvensi Hak Anak (KHA)	jumlah kapasitas SDM yang terlatih	50 Orang	350	0 Orang	0	50 Orang	273	0	0	0	0	0	69	0	0	0	0	69	0	69	0.00 %	0.00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.02.02.16.16.	Penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten Kepulauan Meranti	jumlah profil gender	1 Dokumen	20	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Dokumen	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.02.02.16.23.	Pelaksanaan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap tindak Kekerasan	jumlah sdm yang kompeten	40 Orang	248	40 Orang	106	40 Orang	185	17	47	0	0	0	0	-	-	17 Orang	47	57 Orang	152	142.50 %	61.59 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1.02.02.17.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	persentase perlindungan perempuan dan anak	60 Kasus	92	0 Kasus	0	60 Kasus	84	0	0	0	0	0	0	0	53	0 Kasus	53	0 Kasus	53	0.00 %	0.00 %			
1.02.02.17.10.	Peningkatan Perlindungan perempuan dan anak terhadap tindakan Kekerasan	jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang Ditangani	60 Kasus	92	0 Kasus	0	60 Kasus	55	0	0	0	0	0	44	53	44 Kasus	53	44 Kasus	53	44 Kasus	53	0.00 %	0.00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.02.02.18.	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan	persentase kelembagaan perempuan dan anak yang aktif	90 %	781	0 %	56	90 %	781	0	4	0	23	0	230	0	0	0 %	256	0 %	313	0.00 %	40.01 %			
1.02.02.18.01.	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Organisasi Wanita yang dibina	2 Kelompok	250	2 Kelompok	39	2 Kelompok	742	1	4	0	23	1	34	0	0	2 Kelompok	60	4 Kelompok	99	200.00 %	39.47 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1.02.02.18.04.	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah perempuan yang diberikan bimbingan manajemen usaha	25 Kelompok	381	34 Kelompok	17	25 Kelompok	112	0	0	0	0	24	96	0	0	24 Kelompok	96	58 Kelompok	114	0.00 %	0.00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		Pelayanan Masyarakat Melalui Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Jumlah KB
			K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	I		II		III		IV		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp		
1.02.08.15.	Program Keluarga Berencana	Persentase Akseptor KB Aktif	95 %	948	0 %	184	95 %	915	0	138	0	209	0	273	0	573	0 %	1.194	0 %	1.378	0,00 %	145,35 %		
1.02.08.15.07.	Pembinaan Kader Tribina di 9 Kecamatan	Jumlah Kader BKB,BKR,BKL	60 Orang	150	0 Orang	0	60 Orang	106	0	51	0	6	0	35	0	33	0 Orang	125	0 Orang	125	0,00 %	83,38 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.02.08.15.08.	Penyediaan Jasa Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kab. Kep. Meranti	Jumlah PLKB	9 Orang	242	8 Orang	184	9 Orang	204	4	83	8	83	0	51	0	222	12 Orang	438	20 Orang	622	222,22 %	257,05 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.02.08.15.09.	Advokasi dan Fasilitasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Bagi Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang di advokasi	50 Orang	192	0 Orang	0	50 Orang	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Orang	0	0 Orang	0	0,00 %	0,00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.02.08.15.23.	Penggarapan KB di Wilayah Sasaran Khusus dan GALCITAS	jumlah AKseptor KB	400 Unit	171	0 Unit	0	400 Unit	122	0	4	0	0	0	66	0	76	0 Unit	146	0 Unit	146	0,00 %	85,19 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.02.08.15.24.	Sosialisasi dan Fasilitasi Operasi Media bagi Calon Peserta KB MOW/MOP	jumlah AKseptor KB	120 Unit	193	0 Unit	0	120 Unit	75	0	0	0	121	0	121	0	242	0 Unit	485	0 Unit	485	0,00 %	0,00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.02.08.16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Pik-r Aktif	100 %	416	0 %	41	100 %	416	0	0	0	0	0	0	0	432	0 %	432	0 %	473	0,00 %	0,00 %		
1.02.08.16.04.	Pelatihan PIK-R/M Jalur Sekolah/Masyarakat	Jumlah Peserta Pelatihan PIK-R/M	60 Orang	416	25 Orang	41	60 Orang	124	0	0	0	0	0	0	0	432	0 Orang	432	25 Orang	473	0,00 %	0,00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.02.08.17.	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Akseptor KB Baru Aktif	95 %	379	0 %	17	95 %	379	0	40	0	41	0	0	0	47	0 %	128	0 %	145	0,00 %	38,23 %		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Pencapaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		Tingkat Sosialisasi dan Pembentukan Perilaku Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Jumlah
			K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	I		II		III		IV		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp		
1.02.08.17.09.	Program Pelayanan KB melalui TNI KB KES	jumlah AKseptor KB	95 Unit	201	0 Unit	0	200 Unit	0	0	0	0	-	-	-	-	0 Unit	0	0 Unit	0	0.00 %	0.00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1.02.08.18.	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase masyarakat peserta KB/KR mandiri binaan yang aktif	80 %	417	0 %	0	80 %	417	0	65	0	0	0	64	0	154	0 %	284	0 %	284	0.00 %	68.03 %		
1.02.08.18.02.	Pembinaan Kelompok UPPKS (Asosiasi Kelompok UPPKS) se-kabupaten	jumlah Kelompok yang dibina	25 Kelompok	216	0 Kelompok	0	25 Kelompok	76	1	65	0	0	0	64	0	154	1 Kelompok	284	1 Kelompok	284	4.00 %	131.34 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.02.08.18.04.	Pelatihan Pengelolaan Kelompok UPPKS	Jumlah Kelompok UPPKS	45 Orang	201	0 Orang	0	45 Orang	89	0	0	0	0	0	-	-	0 Orang	0	0 Orang	0	0.00 %	0.00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1.02.08.24.	Program pengembangan model operasional BKB - Posyandu - PADU	Jumlah Kelompok BKB Holistik yang terbentuk	9 Kelompok	233	0 Kelompok	0	9 Kelompok	223	0	54	0	0	0	39	0	126	0 Kelompok	219	0 Kelompok	219	0.00 %	93.99 %		
1.02.08.24.02.	Fasilitasi Pembentukan BKB Holistik Integratif (BKB-Posyandu-Padu)	Jumlah Kelompok	9 Kelompok	233	0 Kelompok	0	9 Kelompok	129	0	54	0	0	0	39	0	126	0 Kelompok	219	0 Kelompok	219	0.00 %	93.99 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.02.08.25.	Program pengendalian penduduk	jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang disusun dan diinformasikan	1 Dokumen	292	0 Dokumen	0	1 Dokumen	265	0	0	0	0	0	0	0	518	0 Dokumen	518	0 Dokumen	518	0.00 %	0.00 %		
1.02.08.25.01.	Pelaksanaan Advokasi Bidang Pengendalian Penduduk	Parameter Kedudukan dalam waktu 5 tahun	1 Tahun	55	0 Tahun	0	1 Tahun	0	0	0	-	-	-	-	-	0 Tahun	0	0 Tahun	0	0.00 %	0.00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	I		II		III		IV		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp		
									K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)								K
1.02.08.25.03.	Pelaksanaan Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB berbasis Kearifan budaya lokal	Jumlah sekolah yang Dibina	20 Orang	39	0 Orang	0	20 Orang	31	0	0	0	0	0	0	0	25	0 Orang	25	0 Orang	25	0.00 %	0.00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Rata-rata capaian kinerja (%)									4.80 %	-	6.00 %	-	10.40 %	-	11.83 %	-	14.75 %	-						
Predikat kinerja									Sangat Rendah	-	Sangat Rendah	-	Sangat Rendah	-	Sangat Rendah	-	Sangat Rendah	-						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			:	-																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja			:	-																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			:	-																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya			:	-																				

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti, merupakan pelayanan di bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah Kabupaten yang terdiri atas :

- a. Pemberdayaan Sosial
- b. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- c. Rehabilitasi Sosial
- d. Perlindungan dan Jaminan Sosial
- e. Penanganan Bencana
- f. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- g. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan
- h. Perlindungan Perempuan
- i. Peningkatan Kualitas Keluarga
- j. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- k. Pemenuhan Hak Anak
- l. Perlindungan Khusus Anak
- m. Pengendalian Penduduk
- n. Pembinaan Keluarga Berencana
- o. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

1. Pemberdayaan Sosial Meliputi :

- a. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) ;
- b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah kabupaten/Kota.

2. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan :

- a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.

3. Rehabilitasi Sosial meliputi :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

4. Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi :

- a. Pemeliharaan Anak-anak terlantar;
- b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/Kota dengan Sub Keempatannya.

5. Penanganan Bencana meliputi:

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial kabupaten/Kota;
- b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana kabupaten/Kota.

6. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan:

- a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

7. Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan Meliputi:

- a. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota;
- c. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan Kewenangan kabupaten/Kota.

8. Perlindungan Perempuan meliputi :

- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah kabupaten/Kota;
- b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan kabupaten/Kota;
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

9. Peningkatan Kualitas Keluarga meliputi :

- a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

10. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak meliputi :

- a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

11. Pemenuhan hak Anak meliputi :

- a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan kabupaten/Kota.

12. Perlindungan Khusus Anak meliputi :

- a. Penyediaan layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah kabupaten/Kota;
- b. Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Daerah kabupaten/Kota.

13. Pengendalian Penduduk meliputi :

- a. Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.

14. Pembinaan Keluarga Berencana (KB) meliputi :

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal;
- b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.

15. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Meranti sejak Tahun 2017 sampai 2021 mengalami peningkatan pertumbuhannya. fakta sosial ini menjadi sangat berkembang, dan menjadi ironis ditengah keinginan masyarakat dan zaman menuntut adanya perbaikan kesejahteraan bagi dirinya dengan melihat indikator pertumbuhan ekonomi yang baik, pemahaman teknologi yang makin maju, dan penguatan ekonomi produksi keluarga yang kokoh.

Indikator-indikator kemajuan suatu masyarakat adalah mulai mengurangnya fakta sosial diatas dalam hal ini adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagai jawaban keberhasilan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti mengatasi permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Adapun kemajuan-kemajuan tersebut antara lain adalah keterjangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial, dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik masyarakat pada tataran menengah ke bawah. Selain itu pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni : adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai kepentingan di Kabupaten Meranti telah meningkat cukup signifikan dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, (yakni berasal dari dalam maupun dari luar Kabupaten Meranti) dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan.

Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

- a. Cakupan atau jangkauan pelayanan terhadap PMKS yang masih sangat terbatas,
- b. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain,

- c. Belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran,
- d. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri,
- e. Masih Kurangnya peran serta perempuan dalam proses pembangunan daerah,
- f. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana
- g. Rendahnya partisipasi masyarakat melalui Iinstitusi Masyarakat Pedesaan dalam pengembangan program Keluarga Berencana
- h. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.

Dari berbagai permasalahan tersebut di atas, maka tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Untuk itu, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas.

Tantangan dan Peluang

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari pembangunan nasional, dengan sasaran utamanya adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Upaya pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan agar PMKS bisa memperoleh kesempatan bekerja dan berusaha sehingga bisa menempuh kehidupan yang layak. Agar pembangunan kesejahteraan sosial segera bisa mengentaskan para penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka perlu didukung dengan serta antara pemerintah dan masyarakat.

Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti sebagai pelaksana kegiatan dalam pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial dirasakan penting mengingat jumlah penyandang masalah di Kabupaten Meranti jumlahnya makin

meningkat akibat dari kompleksitas permasalahan sosial ekonomi didalamnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, beberapa ancaman dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- b. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- c. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun kekerasan terhadap anak terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Belum optimalnya PUS (Pasangan Usia Subur) yang menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang (MOW MOP Implant dan IUD)
- h. Budaya masyarakat yang masih mempertahankan pemahaman “*banyak anak banyak rezeki*”.

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen pemerintah pusat melalui program penanggulangan kemiskinan ekstremitas menjadi nol persen pada tahun 2024.
- b. Adanya regulasi yang mengatur tentang pembagian urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten.
- c. Komitmen kepala Daerah terpilih yang telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan penanganan PMKS di daerah.
- d. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga

PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.

- e. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- f. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- g. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- h. Makin baiknya aksesabilitas dan layanan keluarga berencana.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MERANTI

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut ;

- a. Meningkatkan Reformasi Birokrasi OPD Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:
 - Meningkatnya Reformasi Birokrasi OPD Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:
 - Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS.
 - Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk.
- c. Meningkatkan Kesetaraan Gender. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:
 - Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial PPPA PPKB
Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Reformasi Birokrasi OPD		Nilai Reformasi Birokrasi	N/A	15	18	20	25	29
		Meningkatnya Reformasi Birokrasi OPD	Nilai Reformasi Birokrasi OPD	N/A	15	18	20	25	29
		Meningkatnya Pelayanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	86	88	90	92	94
2.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan	25,28%	24,61%	22,10%	19,50%	19%	18%
		Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	77%	79%	81%	83%	85%	87%
		Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Menurunkan Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2,20	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15
3.	Meningkatkan Kesenjangan Gender		Indeks Pembangunan Gender	86,30%	86,40%	86,50%	86,60%	86,70%	86,80%
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan perempuan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu	96%	97%	97%	97%	98%	98%
			Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	5,06%	6,11%	7,15%	8,13%	9,16%	10,01%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

4.1 Matrik Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											11,234,762,837	12,027,360,403			
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											5,508,608,170	5,958,110,403		
1	06	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											45,000,000	54,000,000	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	95 %	4 Dokumen	29 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	21,000,000
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	95 %	25 Laporan	29 Dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	33,000,000
1	06	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											3,892,208,170	4,288,910,403	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	95 %	33 Orang/bulan	12 Bulan	3,892,208,170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	4,288,910,403
1	06	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											671,000,000	834,150,000	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Paket	12 Bulan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	26,250,000
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	13 Paket	12 Bulan	126,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	147,400,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target			
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	2 Paket	12 Bulan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	24,200,000
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	5 Paket	12 Bulan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	69,300,000
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	95 %	20 Dokumen	12 Bulan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	21,000,000
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	12 Laporan	12 Bulan	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	126,000,000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	137 Laporan	12 Bulan	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	420,000,000
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								850,400,000				726,050,000
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	12 Laporan	12 Bulan	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	11,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	95 %	12 Laporan	12 Bulan	135,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	141,750,000
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	95 %	12 Laporan	12 Bulan	710,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	573,300,000
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								50,000,000					55,000,000
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	25 Unit	129 Unit	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	55,000,000
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								507,688,000					483,000,000
1 06 02 2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)								329,976,000					294,000,000
1 06 02 2.01 01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Persentase PMKS dan KAT yang ditangani	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78 %	40 Keluarga	42 Keluarga	129,976,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS dan KAT yang ditangani	78 %	136,500,000
1 06 02 2.01 02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Persentase PMKS dan KAT yang ditangani	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78 %	70 Keluarga	42 Keluarga	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS dan KAT yang ditangani	78 %	157,500,000
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								177,712,000					189,000,000
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS dan KAT yang ditangani	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78 %	101 Orang	37 Orang	130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS dan KAT yang ditangani	78 %	136,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS dan KAT yang ditangani	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78 %	9 Orang	37 Orang	47,712,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS dan KAT yang ditangani	78 %	52,500,000
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								570,000,000					598,750,000
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								420,000,000					441,250,000
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanaan	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30178 Orang	100 Orang	53 Orang	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	30178 Orang	52,500,000
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30178 Orang	5 Orang	53 Orang	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	30178 Orang	26,250,000
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30178 Orang	20 Orang	53 Orang	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	30178 Orang	36,750,000
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Masyarakat dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30178 Orang	40 Orang	53 Orang	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	30178 Orang	105,000,000
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30178 Orang	15 Orang	53 Orang	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	30178 Orang	47,250,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target	
1 06 04 2.01 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30178 Orang	5 Orang	53 Orang	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	30178 Orang	26,500,000	
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30178 Orang	40 Orang	53 Orang	140,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	30178 Orang	147,000,000	
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								150,000,000					157,500,000	
1 06 04 2.02 13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30178 Orang	65 Orang	65 Orang	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	30178 Orang	157,500,000	
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								4,498,466,667					4,830,000,000	
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								4,498,466,667					4,830,000,000	
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Terlaksananya Pergentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	10000 Orang	53150 Keluarga	1,800,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	85 %	2,100,000,000	
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pergentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pergentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	35000 Keluarga	53150 Keluarga	198,466,667	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	85 %	105,000,000	
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pergentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	10000 Keluarga	53150 Keluarga	2,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	85 %	2,625,000,000	
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA								150,000,000					157,500,000	
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								50,000,000					52,500,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	40 Orang	95 Orang	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	90 %	52,500,000
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota							100,000,000						105,000,000
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	30 Orang	30 Orang	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	90 %	105,000,000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								970,000,000					1,000,000,000
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								250,000,000					262,500,000
2 08 02 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota							50,000,000						52,500,000
2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelebagaan pengarusutamaan Gender (PUG) bagi OPD	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	30 %	52,500,000
2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota							100,000,000						105,000,000
2 08 02 2.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	12 Organisasi	5 Organisasi	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	30 %	105,000,000
2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							100,000,000						105,000,000
2 08 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan pada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	100 Orang	1 Lembaga	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	30 %	105,000,000
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								95,000,000					88,000,000
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							95,000,000						88,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan dalam Rangka Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	2 Kegiatan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %	44,000,000
2 08 03 2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan dalam Rangka Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Perangkat Daerah	2 Kegiatan	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %	44,000,000
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								300,000,000					187,500,000
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								300,000,000					187,500,000
2 08 06 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga dan Anak yang meningkatkan kapasitasnya dalam pemenuhan Kualitas Hidup Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115 Lembaga/Anak	100 Dokumen	15 Lembaga	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga dan Anak yang meningkatkan kapasitasnya dalam pemenuhan Kualitas Hidup Hak Anak	115 Lembaga/Anak	82,500,000
2 08 06 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga dan Anak yang meningkatkan kapasitasnya dalam pemenuhan Kualitas Hidup Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115 Lembaga/Anak	100 Dokumen	15 Lembaga	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga dan Anak yang meningkatkan kapasitasnya dalam pemenuhan Kualitas Hidup Hak Anak	115 Lembaga/Anak	105,000,000
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								325,000,000					462,000,000
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								250,000,000					351,750,000
2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan komprehensif	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Orang	55 Layanan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan komprehensif	100 %	105,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan konfhrensif	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	55 Layanan	55 Layanan	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan konfhrensif	100 %	246,750,000
2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							75,000,000						110,250,000
2 08 07 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan konfhrensif	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan konfhrensif	100 %	110,250,000
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							375,700,000						473,000,000
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							75,000,000						99,750,000
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							75,000,000						99,750,000
2 14 02 2.01 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang disusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 %	1 Dokumen	2 Dokumen	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang disusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	1 %	68,250,000
2 14 02 2.01 05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang disusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Tersedianya Dokumen Hasil Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 %	1 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang disusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	1 %	31,500,000
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							200,700,000						242,000,000
2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal							30,000,000						32,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 %	1 Dokumen	5 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	72 %	11,000,000
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 %	2 Laporan	5 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	72 %	21,000,000
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							170,700,000					210,000,000
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Tertaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PLKB)	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 %	9 Unit	14 Orang	170,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	72 %	210,000,000
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							100,000,000					131,250,000
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							100,000,000					131,250,000
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 %	3 Kelompok	12 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	76 %	78,750,000
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 %	2 Unit	12 Laporan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	76 %	21,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 %	1 Laporan	12 Laporan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	76 %	31,500,000
TOTAL										12,580,462,837		13,500,360,403						

4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Rencana program, Kegiatan, dan SubKegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan diuraikan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

b. Program Pemberdayaan Sosial

1. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
 - Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT;
 - Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT.
2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Kewenangan Kabupaten/Kota.

c. Program Rehabilitasi Sosial

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan;
 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;
 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak;
 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
 - Pemberian Layanan Rujukan.
2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NaPZA di Luar Panti Sosial
 - Pemberian Layanan Rujukan.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

e. Program Penanganan Bencana

1. Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Makanan.
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

f. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG dan PPRG.

2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi.
3. Penguatan dan Pelembagaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

g. Program Perlindungan Perempuan

1. Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

h. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ;
 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

i. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Penyediaan Layanan Bagi anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga

Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

j. Program Pengendalian Penduduk

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota;
 - Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal.

k. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan budaya Lokal;
 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok).
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB.

l. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga :
 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga);
 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga).

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023, usulan program dan kegiatan masyarakat, pengalaman pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sampai dengan saat ini, dan kecenderungan perkembangan masyarakat, serta berbagai dampak dari krisis ekonomi global yang menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks. Renja Tahun 2023 ini juga merupakan penjabaran dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti Tahun 2023.

Dengan demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah bagi kebijakan dan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah. Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus didukung oleh:

1. Komitmen dari unsur pimpinan yang kuat dan bersinergi ;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ;
3. Keberpihakan kepada kesejahteraan sosial pmks ;
4. Peran serta masyarakat, orsos, dan dunia usaha secara aktif ;
5. Sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien.

Kedepan, melalui kerja keras, ketekunan, kebersamaan, dan kesungguhan segenap komponen dan aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, akan menjadi sebuah Dinas yang mampu memberikan Pelayanan Bagi Masyarakat yang membutuhkan.

Akhirnya apa yang dapat disusun dalam wujud Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 ini dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik (Clean Governance and Good Government) dan semoga bermanfaat.

Demikian untuk dilaksanakan.

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Meranti



M. KHARDAFI, SE, M.IP

Penata Tk. I / (III.d)

NIP. 19771118 200901 1 005